





























"Marhun ( barang jaminan ) selama ada di tangan murta - hin ( penerima barang jaminan ) berkedudukan sebagai amanat" ( Ahmad Azhar Basyir, 1977 : 53 ).

Selama marhun ada di tangan murtahin sebagai tanggungan hutang, rahin ( orang yang menyerahkan barang ) tidak berhak menggunakan marhun, akan tetapi sebagai pemilik apabila marhun mengeluarkan hasil, maka itu adalah milik rahin. ( Azhar Basyir, 1977 : 56 ).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa barang jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila hutang rahin sudah dilunasi, tetapi apabila hanya sebagian yang dilunasi, maka barang jaminan tetap berada di tangan penerima gadai sampai ia menerima haknya penuh. ( Sayyid Sabiq XII, 1988 : 156 ).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan, rahin tidak membayar hutangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun. pembelinya boleh murtahin sendiri sebesar piutangnya kepada rahin, dengan akibat apabila penjualan marhun lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan pada rahin dan apabila sebaliknya, maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya. ( Azhar Basyir, 1977 : 54 ).

Selanjutnya Hamzah ya'qub mengatakan, penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari barang

jaminan sekalipun diizinkan oleh pemberi gadai, karena manfaat dalam pinjaman adalah riba. ( Hamzah Ya'qub , 1983 : 28 ).

Menurut As- Syafi'i pemberi gadai adalah pemilik manfaat dari barang jaminan serta berkewajiban atas biaya pemeliharaannya ( nafkahnya ) dan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari barang jaminan. ( Al- Qurtubi II : 412 ).

Segolongan fuqoha berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya barang jaminan bukan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan dalam pinjaman. Barang gadai hanya boleh dipergunakan dan diambil hasilnya oleh yang punya hak.

Sedangkan golongan hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa izin pemilik, kecuali barang itu berupa binatang tunggangan atau perahan, maka barang tersebut bisa diambil manfaatnya sebesar pemberian nafkah sebagai imbalan. ( Al Jaziri II : 327 ).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa status barang jaminan selama penerima hutang belum melunasi hutangnya adalah hanya sebagai amanat atau hanya sebagai tanggungan hutang saja, sampai

penerima hutang melunasi hutangnya.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan rahin tidak bisa melunasi hutangnya, maka hak murtahin adalah menjual barang jaminan tersebut, pembelinya boleh murtahin sendiri atau orang lain asalkan dengan akibat apabila penjualan marhun lebih besar dari jumlah hutang, sisanya harus dikembalikan pada rahin dan apabila sebaliknya maka rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.